

PERAN DAN SIKAP GURU DALAM MENSOSIALISASIKAN PENDIDIKAN POLITIK DI SEKOLAH

Amelia Haryanti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang
ameliiaharyanti2@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu fungsi PKn adalah sebagai Pendidikan hukum dan politik bagi peserta didik. Fungsi PKn sebagai pendidikan hukum dan politik dirasakan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan memperoleh gambaran tentang Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum dan politik dalam mengupayakan Internalisasi Hukum dan politik di Kalangan Peserta didik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan sejumlah temuan penelitian, tampak bahwa PKn sebagai wahana pendidikan hukum dan politik dalam mengupayakan internalisasi hukum bagi peserta didik masih belum berfungsi secara maksimal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu adanya revitalisasi PKn sebagai pendidikan hukum dan politik baik dari pendekatan konten maupun pendekatan proses.

Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Hukum, Pendidikan Politik.

PENDAHULUAN

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Selama ini guru telah menjadi pelayan kepala sekolah, penilik, penyelia, peneliti, penulis buku teks, dan penyusun kurikulum, atau Departemen Pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan penelitian (*research approach*) perlu diadopsi agar guru mampu membebaskan diri mereka dari posisi yang senantiasa dikontrol. Dalam hal ini, mereka dimotivasi untuk mengikuti spesifikasi kurikulum atau strategi mengajar, tetapi pada saat yang bersamaan juga dianjurkan untuk menelitinya dan mengevaluasinya secara kritis. Dengan kata lain, mereka didorong untuk aktif dalam kegiatan pengembangan profesional yang bermanfaat dan sekaligus dilibatkan dalam proses penyempurnaan sehingga mereka akan menjadi mandiri dalam penilaian profesional (*professional judgment*).

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kepribadian subyek didik. Dalam jangka pendek, pendidikan berarti proses belajar mengajar di kelas; dalam jangka menengah pendidikan

berarti pengembangan subyek didik seutuhnya; dan dalam jangka panjang pendidikan merupakan fenomena kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai moral, estetis dan budaya.

Secara mikro, praktek kependidikan di Indonesia masih bertumpu kepada peran guru sebagai ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kependidikannya. Namun pentingnya peran guru belum diimbangi oleh kesadaran pemerintah untuk memberdayakannya. Dalam posisi dibutuhkan tetapi tidak diperhatikan itulah maka sebagian guru kita mengalami stagnasi yaitu tidak mampu mengembangkan kreativitas mengajarnya karena tidak terdapat ruang untuk itu. Penelitian dari DR.Marsigit (1996) menunjukkan bahwa guru lebih suka menerapkan metode pembelajaran sesuai petunjuk Kepala Sekolah, Penilik Sekolah atau Pengawas daripada bereksperimen atau mencoba berbagai cara lain; karena hal itu lebih memberi rasa aman dan tenang bagi mereka. Dengan demikian mudahlah dipahami

mengapa setiap usaha inovatif kependidikan yang disponsori perguruan tinggi tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berbagai teori dan pengalaman mengajar yang diperoleh melalui penataran, kepelatihan dan studi lanjut di perguruan tinggi, tidak pernah dapat dipraktekan di sekolah; para guru akan kembali mengajar seperti semula ketika mereka kembali ke sekolah.

Sosialisasi politik memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku politik dan kelompok berkenaan dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap politik tertentu. Proses sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Gabriel A. Almond menjelaskan proses sosialisasi yaitu proses “pengajaran” nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini nilai-nilai dan kebudayaan politik kepada warganegara. Ada dua hal yang

penting dan menarik mengenai proses ini, pertama, sosialisasi politik bisa langsung melalui pendidikan, dan yang kedua adalah melalui proses tidak langsung yang disebabkan latar belakang kehidupan seseorang. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab, ini merupakan salah satu dasar dan tujuan dari pendidikan nasional yang seharusnya menjadi acuan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan kaburnya batas-batas antar negara (baik secara politik, ekonomi, maupun sosial), masalah

nasionalisme tidak lagi dapat dilihat sebagai masalah sederhana yang dapat dilihat dari satu perspektif saja, sehingga sikap nasionalisme perlu dipupuk sejak dini agar tercipta generasi muda yang memiliki sifat cinta tanah air dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Sehubungan dengan globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan kaburnya batas-batas antar negara (baik secara politik, ekonomi, maupun sosial), masalah nasionalisme tidak lagi dapat dilihat sebagai masalah sederhana yang dapat dilihat dari satu perspektif saja, sehingga sikap nasionalisme perlu dipupuk sejak dini agar tercipta generasi muda yang memiliki sifat cinta tanah air dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dibangun dan ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman tentang simbol-simbol seperti lambang negara, bendera nasional, bahasa nasional serta lagu kebangsaan. Sekolah juga mengajarkan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan politik, dimana

anak diajarkan mengenali nilai, norma, serta atribut politik di sekolah. Tujuan pendidikan politik adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, anti-korupsi, serta membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Tujuan pendidikan politik adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, anti-korupsi, serta membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian. Melalui metode ini data yang diperlukan diklasifikasikan, dan disusun untuk memperoleh gambaran masalah pada saat penelitian dilakukan. Sementara pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan lebih menekankan kepada kajian interpretatif (Strauss dan Corbin, 2009:4). Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Terkait dengan penentuan subjek dalam penelitian ini, ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian, yakni latar (setting), para pelaku (actors), peristiwa-peristiwa (events), dan proses (process) (Miles dan

Huberman, 2007:57). Kriteria pertama adalah latar, yang dimaksud adalah situasi dan tempat berlangsungnya proses pengumpulan data. Sementara untuk melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber, tidak menutup kemungkinan bahwa tempatnya disesuaikan dengan keinginan narasumber yang bersangkutan. Kriteria kedua, pelaku, yang dimaksud adalah siswa, guru dan kepala sekolah, dan pakar yang berlatar keilmuan terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan serta banyak menaruh perhatian yang tinggi terhadap pendidikan politik. Kriteria ketiga adalah peristiwa, yang dimaksud adalah pandangan, pendapat dan penilaian tentang pendidikan politik dalam menciptakan kesadaran politik siswa, baik yang disampaikan secara individual baik dalam kegiatan pertemuan, seminar atau lokakarya. Kriteria keempat yaitu proses, yang dimaksud adalah peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian berkenaan dengan pandangannya terhadap fokus masalah dalam

penelitian ini. Sementara analisis data terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang terkumpul menggunakan analisis data induktif. Analisis data tersebut mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman (2007:16-19) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah

Pendidikan politik yang ada di sekolah selain diperoleh dari materi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, juga dapat diperoleh melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu: kegiatan upacara bendera ini dilaksanakan pada hari senin, sebagai suatu wahana membentuk rasa nasionalisme dan kedisiplinan siswa; kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi berbagai

macam bidang, diantaranya Pramuka, PMR maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya; melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), maupun bentuk lainnya yang berusaha menyampaikan informasi politik, semisal melalui pemasangan potongan koran pada papan informasi atau majalah dinding atau juga kegiatan lainnya yang sifatnya insidental seperti sosialisasi pemilu ketika akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

B. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik di Sekolah

Berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi maupun wawancara yang dilakukan didapat data maupun keterangan mengenai bentuk-bentuk pendidikan politik di sekolah antara lain sebagai berikut:

1. Pembelajaran PKn

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran politik siswa, karena jika didasarkan pada tujuannya, PKn atau dalam istilah

lain lebih dikenal sebagai civic education mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan politik. Dalam kurikulum PKn terdapat beberapa materi politik yang nantinya dengan penyampaian materi politik tersebut diharapkan akan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai informasi politik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran politik siswa dan lebih jauhnya akan dapat mendorong siswa untuk ikut berperan serta dalam kegiatan politik dalam lingkup kecil seperti di sekolah maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di sekolah pelaksanaan pendidikan politik utamanya dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maupun melalui program kegiatan lainnya. Dalam mata pelajaran PKn terdapat materi-materi yang merupakan wujud dari pelaksanaan pendidikan politik. Pada tingkatan SMA khususnya di Kelas X

terdapat materi mengenai hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada pula materi menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan dan materi sistem politik di Indonesia.

Pada Kelas XI terdapat materi budaya politik di Indonesia, dan di Kelas XII terdapat materi berbagai sistem pemerintahan. Hadirnya materi politik di dalam mata pelajaran PKn berperan penting dalam menambah wawasan terkait dengan pengetahuan politik siswa. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pembelajaran PKn, Guru dalam menyampaikan materi politik selalu berpedoman pada sumber belajar yang relevan dan selalu di update informasinya setiap saat berdasarkan kondisi dan isu yang terjadi saat itu. Diharapkan dengan sumber belajar tersebut siswa akan lebih mudah memahami dan mengerti tentang materi politik terutama sekali siswa mendapat materi yang aktual berdasarkan konteks yang terjadi saat itu. Tidak

hanya memaksimalkan pembelajaran politik dengan pemanfaatan sumber belajar saja, Guru dalam mengajar pun sudah menggunakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan dan partisipatif.

Penggunaan metode dan model pembelajaran tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar siswa menjadi tertarik terhadap pelajaran dan akhirnya dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran Guru sudah merancang suatu bentuk pembelajaran yang tidak hanya dilakukan didalam kelas saja, tetapi juga dapat memfasilitasi pembelajaran PKn di luar kelas. Dengan pembelajaran di luar kelas siswa belajar mempraktekkan langsung teori yang didapat ketika pembelajaran dilakukan didalam kelas. Praktek tersebut bisa dilakukan dalam bentuk simulasi. Dengan melakukan simulasi siswa akan lebih faham dan menjadi lebih mengerti tentang materi yang diberikan.

2. Program Kesiswaan

Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah selain melalui mata pelajaran PKn juga dilakukan melalui program yang dibuat oleh bagian kesiswaan. Program kesiswaan yang ada di sekolah diantaranya adalah program pengembangan diri melalui ekstra kurikuler, satuan tugas pelaksanaan kesiswaan, tata tertib dan disiplin, program sosialisasi dan program pembinaan OSIS. Yang amat sangat terkait dengan program pendidikan politik yaitu, program pembinaan OSIS dan kegiatan ekstra kulikuler.

Dalam kegiatan OSIS yang menjadi poin penting pelaksanaan pendidikan politik yaitu bagaimana siswa belajar untuk berorganisasi. Adanya pembinaan OSIS yang dilaksanakan oleh pihak kesiswaan, telah menjadi bukti bahwa sekolah telah melaksanakan kegiatan dalam pendidikan politik di sekolah untuk siswanya. Pembinaan yang dilaksanakan terhadap OSIS akan memberikan mereka pengetahuan

dan pengalaman mengenai kepemimpinan dan bagaimana cara menjalankan roda organisasi. Organisasi OSIS akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan serta dalam kegiatan politik di sekolah. Dalam kegiatan OSIS, ada beberapa hal yang menjadi bagian penting dari proses pendidikan politik yaitu adanya pemilihan OSIS secara langsung oleh warga sekolah yang dilaksanakan rutin setahun sekali dan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang bertujuan memberikan keterampilan kepemimpinan bagi siswa calon pengurus OSIS.

PEMBAHASAN

Dalam menjalankan dan mengoptimalkan proses pendidikan politik maka perlu strategi dan tempat yang tepat di mana pendidikan politik itu dilaksanakan. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai sarana atau tempat pelaksanaan pendidikan politik adalah sekolah. Sekolah merupakan

suatu wahana untuk pendidikan politik yang mengarah pada tujuan agar siswa menjadi insan yang melek politik. Pendidikan politik terkait dengan konsep dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, sikap dan nilai-nilai tentang sistem politik masyarakat, umumnya negara. Maka diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk menciptakan sekolah sebagai laboratorium pendidikan politik. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan politik formal yang mempunyai peran dalam pelaksanaan pendidikan politik. Pendidikan politik di sekolah dapat diperoleh melalui pembelajaran formal di kelas melalui teori-teori yang diajarkan oleh guru dan praktek secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Dalam pembelajaran formal, sekolah juga memfasilitasi pendidikan politik melalui kurikulum. Walaupun tidak secara langsung disebutkan mata pelajaran

pendidikan politik, tetapi muatan pendidikan politik tertuang dalam mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi alternatif pelaksanaan pendidikan politik di sekolah. Untuk terciptanya pelaksanaan pendidikan politik yang kondusif, maka peran sekolah sangatlah penting. Tetapi peran ini pun perlu didukung oleh peran serta dari semua elemen dan warga sekolah. Selain menerapkan pendidikan politik dalam bentuk kurikulum, baik yang didesain khusus dalam PKn, maupun secara khusus dimana politik diberikan dalam mata pelajaran lain, bentuk kegiatan yang dapat difasilitasi oleh sekolah yang berhubungan dengan proses pendidikan politik diantaranya adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibra, pramuka ataupun PMR.

Melalui bidang kesiswaan, setiap sekolah dapat memberi peran dalam pelaksanaan pendidikan politik. Waka Kesiswaan

merupakan wakil Kepala Sekolah yang membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam hal pembinaan OSIS. Pembinaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan pemberian berbagai bentuk bantuan yang dilakukan oleh pembina OSIS atau sekolah. Tujuan pembinaan tersebut adalah untuk meningkatkan peran serta dan inisiatif para siswa untuk menjaga dan membina sekolah sebagai wiyatamandala sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah, meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara, meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat serta nilai-nilai 45, serta meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani.

Didalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1993 disebutkan bahwa Organisasi Kesiswaan di sekolah adalah OSIS. Kepanjangan OSIS terdiri dari: Organisasi, Siswa, Intra, Sekolah. Organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Yang dimaksud siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan Intra diartikan sebagai di dalam sekolah dan diantara para siswanya, sehingga OSIS berarti suatu organisasi siswa yang ada didalam dan lingkungan sekolah yang bersangkutan. OSIS adalah satu-

satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu setiap sekolah wajib membentuk OSIS, yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS disekolah lain yang tidak menjadi bagian/alat dari organisasi lain yang ada diluar sekolah.

OSIS sebagai tempat berkelompok siswa dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini OSIS dipandang sebagai sistem, dimana sekumpulan para siswa mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan. Oleh karena itu OSIS sebagai suatu sistem ditandai beberapa ciri pokok; berorganisasi pada tujuan, memiliki susunan kehidupan kelompok, memiliki sejumlah peranan, terkoordinasi dan berkelanjutan dalam waktu tertentu. Salah satu dari ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi dan peranan. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi

memiliki pula beberapa peranan atau fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan, peranan OSIS yaitu sebagai wadah kegiatan para siswa disekolah bersama dengan pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Selain itu OSIS berperan sebagai motivator yang menyebabkan lahirnya keinginan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Lebih lanjut OSIS mempunyai peranan yang bersifat preventif dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada secara eksternal OSIS untuk mampu mengadaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya.

Dengan demikian secara preventif OSIS berhasil ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Melalui peranan

OSIS tersebut dapat ditarik beberapa manfaat yaitu: dapat meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air; meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur; meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan; meningkatkan ketrampilan, kemandirian dan rohani; meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani; dan menghargai dan menjiwai nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Selain pembinaan OSIS, kesiswaan juga dapat melaksanakan program pendidikan politik melalui pembinaan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar jam pelajaran biasa atau pada waktu libur sekolah yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan

minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi siswa untuk mendapatkan pendidikan politik diantaranya yaitu pramuka, paskibra, ataupun PMR.

Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah dapat dilakukan dengan cara lain, semisal dengan membuat suatu kegiatan yang secara langsung memberikan informasi politik kepada siswa seperti dalam bentuk penyuluhan ataupun sosialisasi politik yang mengundang praktisi politik maupun pembicara yang ahli dibidang politik. Selain itu bisa juga pendidikan politik dilakukan melalui bentuk lain yaitu dengan menempelkan informasi politik seperti surat kabar atau majalah yang ditempel di papan pengumuman sekolah ataupun dalam majalah dinding. Selain ada peran sekolah secara umum, diperlukan juga peran serta guru dalam proses Pendidikan Politik.

Adapun tugas guru dalam proses pendidikan politik, yaitu sebagai pemegang dan penyampai nilai-nilai serta pandangan-pandangan tentang pendidikan politik, dan sebagai kreator dan manipulator budaya belajar, karena pada kenyataannya budaya atau kebiasaan belajar anak di kelas secara tidak langsung akan menimbulkan akibat politik. Dalam pembelajaran pendidikan politik peran guru sangatlah penting, terlebih lagi sebagai seorang guru PKn. Dimana seorang guru PKn harus mampu mengajarkan kepada siswanya tentang pendidikan politik pada saat proses pembelajaran ataupun diluar proses pembelajaran di sekolah tersebut. Misalnya pada proses pembelajaran seorang guru memberikan kesempatan untuk bertanya, mendiskusikan materi dan lain-lain.

PENUTUP

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka

dapat dirumuskan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan di sekolah kepada siswa yaitu melalui materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selain itu dapat diperoleh melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu: kegiatan upacara bendera ini dilaksanakan pada hari senin, sebagai suatu wahana membentuk rasa nasionalisme dan kedisiplinan siswa; kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi berbagai macam bidang, diantaranya Pramuka, PMR maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya; melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), maupun bentuk lainya yang berusaha menyampaikan informasi politik melalui pemasangan potongan koran pada papan informasi atau majalah dinding juga kegiatan lainnya yang sifatnya insidental

seperti sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

2. Dalam mengoptimalkan proses pendidikan politik maka perlu tempat yang tepat di mana pendidikan politik itu dilaksanakan. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai sarana atau tempat pendidikan politik itu adalah di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan suatu wahana untuk pendidikan politik yang mengarah pada tujuan agar siswa menjadi insan yang melek politik (sadar politik). Pendidikan politik terkait dengan konsep dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, sikap dan nilai-nilai tentang sistem politik masyarakat, umumnya negara. Maka diperlukan kerjasama berbagai pihak baik kepala sekolah, bidang kesiswaan maupun gurudan elemen sekolah lainnya untuk menciptakan sekolah sebagai laboratorium pendidikan

politik,. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik di sekolah.

SARAN

Saran ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan proses pendidikan politik di sekolah secara berkesinambungan melalui berbagai bentuk program kegiatan sekolah baik yang secara langsung dimasukan kedalam kurikulum maupun kegiatan keseharian yang terencana maupun yang sifatnya insidental.
2. Pihak sekolah hendaknya membuat kebijakan yang mendukung terhadap terciptanya sekolah sebagai laboratorium pendidikan politik.
3. Untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan

politik di sekolah, maka seluruh elemen sekolah mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan pegawai sekolah sampai dengan siswa sekolah itu sendiri diharapkan bahu membahu mendukung program pendidikan politik di sekolah baik yang terencanakan maupun yang sifatnya insidental.

DAFTAR PUSTAKA

Miles, M.B. & Huberman, A. M. 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul *Qualitative Data Anlysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Muhammad Sirozi. 2005. Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Raja Grafindo Persada.

Strauss, A. & Corbin, J. 2009. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data. Terjemahan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien dari judul Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures

and Techniques. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudijono Sastroatmodjo. 1995. Perilaku politik. Semarang: IKIP Press. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik.